



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 715/SEK/HM.02.3/3/2022 Jakarta, 14 Maret 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Sosialisasi Penyusunan Laporan Tahunan
Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Tahun Anggaran 2021
secara virtual

Yth.

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
2. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Para Sekretaris Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI
5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-73/KN/KN.2/2022 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Tahun Anggaran 2021 tanggal 25 Februari 2022, disampaikan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung bahwa dengan ini diinformasikan terkait penyampaian laporan tahunan pengawasan dan pengendalian BMN tahun anggaran 2021 melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) plugin wasdal, perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, yang antara lain mengatur:
 - a. Pelaksanaan Wasdal BMN dan pelaporan atas pelaksanaan Wasdal BMN tersebut dilaksanakan mengacu ketentuan PMK 207/PMK.06/2021 berlaku sejak 1 Januari 2022.
 - b. Berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, maka:
 - 1) Pelaksanaan Wasdal BMN oleh Pengelola Barang, dilaporkan secara periodik semesteran dan tahunan oleh unit pelaksana Wasdal BMN lingkup Pengelola Barang secara berjenjang kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
 - 2) Pelaksanaan Wasdal BMN oleh Pengguna Barang, dilaporkan secara periodik semesteran dan tahunan oleh Satker/Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang Tingkat Wilayah, Pengguna Barang Eselon I pelaksana Wasdal BMN lingkup Pengguna Barang secara berjenjang kepada Pengguna Barang.

- 3) Laporan Pengelola Barang dikonsolidasikan dengan laporan Wasdal BMN yang disampaikan Pengguna Barang sebagai Laporan Wasdal BMN Semesteran dan/atau Tahunan.
 - 4) Waktu pelaporan Wasdal BMN pada lingkup Pengguna Barang berdasarkan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 adalah setiap Semesteran dan Tahunan.
2. Bahwa pelaporan Wasdal BMN sesuai PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 52/PMK.06/2016 salah satunya mengatur bahwa Satker menyampaikan laporan Wasdal BMN tahunan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, sehingga laporan wasdal tahun 2021 akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2022.
 3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka pada Tahun 2022 diharapkan Saudara segera menyusun laporan Wasdal BMN Tahun 2021 sebagaimana ketentuan pada angka 2 di atas dan melaksanakan Wasdal BMN dan melaporkan pelaksanaan Wasdal BMN Tahun 2022 periode semesteran dan tahunan sebagaimana ketentuan pada angka 1 di atas.

Sehubungan dengan hal itu, Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi akan menyelenggarakan Sosialisasi dan Penyusunan Laporan Tahunan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN Tahun 2021 secara virtual pada hari Rabu, 16 Maret 2022 (jadwal terlampir), dengan *meeting ID*: 639 626 9287 dan *password*: RokapMA. Mengingat penting dan mendesaknya kegiatan tersebut, diminta agar saudara dapat mengikuti secara saksama dan sungguh-sungguh.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris

Mahkamah Agung RI,



Hasbi Hasan

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
8. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.